

RINGKASAN

Marzuki **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN**
247410101028 **NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM**
PEMERINTAHAN ACEH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH
(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H dan Prof. Dr. Faisal, S. Ag.,
S.H., M.Hum)

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut adalah pengaturan mengenai pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Aceh yang mensyaratkan persetujuan Gubernur Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1). Pengaturan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Kepolisian sebagai institusi nasional di bawah Presiden tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam pengangkatan pejabat kepolisian. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Kepolisian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem Pemerintahan Aceh, mengkaji disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan Kepolisian dalam sistem Pemerintahan Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi norma terletak pada perbedaan konstruksi kewenangan, di mana Undang-Undang Kepolisian menempatkan pengangkatan Kapolda sebagai kewenangan atributif Kapolri dalam sistem komando nasional, sedangkan UUPA mensyaratkan persetujuan Gubernur Aceh tanpa mengatur secara jelas sifat, ruang lingkup, maupun akibat hukum dari persetujuan tersebut. Akibatnya, muncul kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Keterlibatan Gubernur Aceh merupakan bentuk pengakuan terhadap kekhususan Aceh yang bersifat prosedural dan tidak mengubah kedudukan Polri sebagai institusi nasional. Saran, diperlukan harmonisasi melalui penyempurnaan Pasal 205 UUPA dengan memperjelas kedudukan persetujuan Gubernur Aceh beserta mekanisme pelaksanaannya agar tercipta kepastian hukum tanpa mengurangi prinsip sistem komando nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kewenangan Pemerintahan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh.*

SUMMARY

Marzuki
247410101028 **JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF THE**
INDONESIAN NATIONAL POLICE WITHIN THE ACEH
GOVERNMENT SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 11
OF 2006 ON THE GOVERNING OF ACEH
(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H and Prof. Dr. Faisal, S. Ag.,
S.H., M.Hum)

The Unitary State of the Republic of Indonesia, as a state based on the rule of law, implements a decentralization system by granting special autonomy to Aceh through Law Number 11 of 2006 on the Governing of Aceh. One form of this special autonomy is the regulation concerning the appointment of the Chief of the Aceh Regional Police, which requires the approval of the Governor of Aceh as stipulated in Article 205 paragraph (1). This provision differs from Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, which positions the Indonesian National Police as a national institution under the authority of the President without involving regional governments in the appointment of police officials. This difference gives rise to juridical issues concerning the scope of the Aceh Government's authority over the Indonesian National Police and has the potential to create normative disharmony between the two laws.

This study aims to analyze and explain the legal position of the Indonesian National Police within the Aceh government system, examine the normative disharmony between Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police and Law Number 11 of 2006 on the Governing of Aceh, and analyze the legal consequences of such disharmony on the position of the Indonesian National Police within the Aceh government system.

This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the normative disharmony lies in the difference in the construction of authority. Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police vests the authority to appoint the Chief of the Regional Police (Kapolda) as an attributive power of the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri) within the national chain of command system, whereas Law Number 11 of 2006 on the Governing of Aceh requires the approval of the Governor of Aceh without clearly regulating the nature, scope, or legal consequences of such approval. Consequently, this regulatory gap creates legal uncertainty, overlapping authority, and differing interpretations in its implementation. The involvement of the Governor of Aceh constitutes a form of recognition of Aceh's special autonomy that is procedural in nature and does not alter the constitutional status of the Indonesian National Police as a national institution. Recommendation, harmonization is required through the amendment of Article 205 of the Law on the Governing of Aceh by clarifying the legal status of the Governor's approval and its implementation mechanism in order to ensure legal certainty while preserving the principle of the Indonesian National Police's national chain of command system.

Keywords: *Position of the Indonesian National Police, Government Authority, Law on the Governing of Aceh.*